



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 20 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK TENGAH
UNIT KERJA : DINAS LINGKUNGAN HIDUP
SUB UNIT KERJA : SEKRETARIAT

I. DATA PRIBADI

1. Nama : **MUHAMMAD SUKARMAN**
2. Jabatan : **SEKRETARIS DINAS LINGKUNGAN HIDUP**
3. NHK : **476709**

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 1.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 400 m²/400 m² di LOMBOK TENGAH, WARISAN Rp. 1.500.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 399.000.000

1. MOBIL, SUZUKI /267/BC 415C 4X2 M/T MB PICK UPP Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
2. MOTOR, HONDA SPM R 2 Tahun 2015, HASIL SENDIRI Rp. 10.000.000
3. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp. 16.000.000
4. MOTOR, HONDA SPM R2 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000
5. MOBIL, TOYOTA MINIBUS Tahun 2018, HIBAH TANPA AKTA Rp. 276.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. 635.075.000**D. SURAT BERHARGA** Rp. ----**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 59.389.051**F. HARTA LAINNYA** Rp. ----**Sub Total** Rp. 2.593.464.051**III. HUTANG** Rp. 220.000.000**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 2.373.464.051

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkn.kpk.go.id.



Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **2 Juli 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.